

BURUH TANI TEMBAKAU DAN PABRIK ROKOK DI KLATEN DAPAT BANTUAN RP 1,2 JUTA, STIMULAN MENUJU SEJAHTERA



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jogja/foto/bank/images/Bupati-Klaten-Sri-Mulyani-menyerahkan-BLT-DBHCHT.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Sebanyak 6.331 buruh tani dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Klaten mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) sebanyak Rp 1,2 juta periode empat bulan, Mei-Agustus 2023.

BLT itu diberikan dalam satu tahap dan berasal dari dana bagi hasil cukai hasil cukai tembakau (DBHCHT). Total BLT yang dicairkan untuk bantuan adalah Rp 7,5 miliar.

Penyerahan bantuan secara simbolis BLT DBHCHT diselenggarakan di Pendopo Pemerintah Kabupaten Klaten, Senin (25/9/2023).

Bupati Klaten, Sri Mulyani menyerahkan secara simbolis kepada tiga penerima yakni Wagiman dari Desa Ketandan Klaten Utara, Istiqomah dari Desa Pasungan Ceper, dan Muryanto Desa Taskombang Manisrenggo

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dissos P3APPKB) Klaten, M Nasir, menjelaskan, setiap penerima mendapatkan Rp 300 ribu per bulan.

“Syaratnya, mereka bukan penerima BLT DBHCHT provinsi dan merupakan buruh tani dan buruh pabrik rokok ber-KTP Klaten,” jelas dia dalam sambutan.

Bantuan itu, kata dia, ditujukan untuk mengurangi beban kebutuhan sehari-hari para penerima bantuan dan meningkatkan motivasi bekerja.

Bantuan juga disalurkan melalui Bank Klaten dari 25 September-25 Oktober 2023.

Bupati Klaten, Sri Mulyani mengungkapkan, BLT ini bisa menjadi stimulan di tengah kondisi ekonomi yang belum mapan pascapandemi Covid-19.

Sri Mulyani berpesan kepada para penerima BLT DBHCHT untuk menggunakan bantuan dengan baik. Salah satunya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Manfaatkan stimulan ini dengan baik. Dalam hal ini, pemerintah ikut membantu perekonomian bapak ibu penerima. Semoga program ini dapat membantu perekonomian masyarakat dan menuju keluarga yang lebih sejahtera," tuturnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Klaten, Amin Mustofa juga berharap hal yang senada, bantuan itu bisa meringankan beban produksi penanaman tembakau.

Apalagi, selama ini, Diskominfo Klaten juga aktif mensosialisasikan penggepungan rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai ataupun pita cukai palsu.

"Ini kemarau, BLT itu pasti dibutuhkan dan diharapkan bisa meningkatkan semangat. Jangan salah sasaran," tutup dia ketika diwawancara Tribun Jogja. (ard)

Sumber Berita:

1. <https://jogja.tribunnews.com/2023/09/25/buruh-tani-tembakau-dan-pabrik-rokok-di-klaten-dapat-bantuan-rp-12-juta-stimulan-menuju-sejahtera>, "Buruh Tani Tembakau dan Pabrik Rokok di Klaten Dapat Bantuan Rp 1,2 Juta, Stimulan Menuju Sejahtera", tanggal 25 September 2023.
2. <https://klatenkab.go.id/ribuan-buruh-tani-tembakau-di-klaten-terima-blt-dbhcht/>, "Ribuan Buruh Tani Tembakau di Klaten, Terima BLT DBHCHT", tanggal 25 September 2023.

Catatan

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, Sebanyak 6.331 buruh tani dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Klaten mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) sebanyak Rp 1,2 juta periode empat bulan, Mei-Agustus 2023.
BLT itu diberikan dalam satu tahap dan berasal dari dana bagi hasil cukai hasil cukai tembakau (DBHCHT). Total BLT yang dicairkan untuk bantuan adalah Rp 7,5 miliar
- Bantuan Langsung Tunai (*cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang

diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.¹

- BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.²
- Penerima BLT adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.³
- BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 55
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain:
 - a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
 2. Pasal 56
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.

¹ “Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya”, diakses dari Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 September 2022, pukul 07:59

² *Ibid*

³ *Ibid*

- Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
- DBHCHT tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.470.207.767.000.⁴ Rincian DBHCHT provinsi/kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp1.207.312.334,-⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022, Pasal 1 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Lampiran